

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi kepustakaan

Adapun sebagai bahan acuan penulis mengangkat judul penelitian “Peranan Kepala Desa Dalam Melakukan Koordinasi Terhadap Pembangunan Fisik Di Desa Sidomukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan”, maka berikut penulis kemukakan beberapa konsep ataupun teori-teori yang mendukung serta yang berkaitan dengan variabel yang di teliti untuk memecahkan permasalahan yang akan penulis antara lain yaitu:

1. Konsep Administrasi Publik

Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendaya gunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Silalahi (dalam Zulkifli,2014;11)

Menurut Filex A. Nigro dan L. Loyd G.Nigro (dalam Pasolong, 2010;8) mengatakan Administrasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah.
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka.
3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Alternatif prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi, Henry Fayol (dalam Zulkifli,2005;71) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi yaitu :

- a. Pembagian kerja
- b. Pendelegasian dan wewenang
- c. Disiplin
- d. Kesatuan Perintah
- e. Kesatuan arah dan tujuan
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi
- g. Pengupahan atau penggajian
- h. Sentralisasi
- i. Skala hierarki
- j. Tata tertib
- k. Keadilan
- l. Stabilitas jabatan
- m. Prakarsa atau inisiatif
- n. Solidarita sekelompok kerja

Selain dari prinsip-prinsip umum administrasi perlu kita pahami bahwasanya terdapat unsur-unsur administrasi. Menurut Warman (12;11) unsur-unsur administrasi itu memiliki 8 bagian yaitu:

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Komunikasi
- d. Kepegawaian
- e. Keuangan
- f. Perbekalan
- g. Tata usaha
- h. Hubungan masyarakat

Menurut Felix A. Nigro dan L. Loyd G.Nigro (dalam Pasolong,2010;8) mengatakan Administrasi Publik adalah sebagai berikut :

1. Suatu kersama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
2. Meliputi tiga cabang pemerintahan : Eksekutif, legislatif, dan serta hubungan diantara mereka.
3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Menurut Nigri& Nigro (dalam Wirman Syafri,2012;20) Administrasi Publik adalah :

1. Usaha kerja sama kelompok dalam kerangka organisasi negara.
2. Meliputi ketiga cabang eksekutif (pemerintahan), legislatif (DPR), dan yudisial/yudikatif (kehakiman) dan hubungan timbal balik antara ketiganya.
3. Memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan publik sehingga merupakan bagian dari proses politik.
4. Berbeda secara signifikan dengan administrasi swasta.
5. Berhubungan erat dengan sejumlah kelompok swasta dan individu dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Leonard D. White (dalam Wirman Syafri,2012;23) Dalam arti luas Administrasi Publik terdiri dari semua kegiatan yang bermaksud melaksanakan dan memaksakan kebijakan umum atau kebijakan negara (*publik polity*).

Menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithurg (dalam Wirman Syafri,2012;23) Administrasi Publik adalah aktivitas-aktivitas cabang eksekutif dari pemerintahan tingkat negara, negara bagian dan daerah, aktivitas badan dan komisi yang ditetapkan oleh kongres dan ketentuan perundang-undangan negara bagian, aktivitas perusahaan negara dan dinas-dinas tertentu lainnya yang bersifat khusus.

Menurut Paul C.Bartholomew (dalam Wirman Syafri, 2012:23-24) menyatakan Administrasi Publik menurut pengertian ilmu politik mempunyai dua arti. Dalam arti luas, administrasi publik berarti pekerjaan-pekerjaan yang terliput di dalam (yang dilakukan dalam rangka) penanganan yang aktual terhadap masalah-masalah pemerintahan, dalam arti sempit, administrasi publik berarti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh cabang administrasi saja, yakni kegiatan kepala eksekutif (kepala negara) dan para pejabat pembantuannya yang disebut administrator. Sedangkan Administrasi Publik adalah proses penyelenggaraan kehendak publik (*public will*) sebagaimana yang dinyatakan di dalam hukum, dengan kata lain pengoordinasian usaha bersama untuk mengimplementasikan kebijakan umum. Lebih tegas dapat dikemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan cara unit perumus kebijakan dari keseluruhan pemerintahan-pemilih, legislatif atau eksekutif.

Menurut Nicholas Henry (dalam Mulyadi,2016;34), Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektifitas dan efesiensi.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2010;-8) mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik,

dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih respotif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efesiensi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Orientasi administrasi publik menurut Thoha (dalam Pasolong,2007:53), sekarang ini diarahkan kepada kepentingan dan kekuasaan kepada rakyat alasan seperti itu teori administrasi publik lebih menekankan pada program aksi yang berorientasi pada kepentingan publik, sehingga eksistensi administrasi publik tidak hanya sekedar lukisan saja melainkan adanya manfaat bagi kepentingan public.

Dengan demikian bahwa Administrasi Publik dan juga yang lebih dikenal dengan sebuah administrasi Negara yaitu merupakan sekumpulan orang yang saling bekerjasama didalam suatu organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan organisasi secara efektif dan efesien, dan juga administrasi Negara bergerak dalam organisasi pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan sebuah pelayanan yang baik bagi seluruh masyarakat melalui kinerja pegawai yang kompeten dalam bekerja sehingga akhirnya dapat menciptakan suatu kepuasan terhadap pemberian pelayanan.

2. Konsep Organisasi

Menurut Siagian (dalam Zulkifli,2005;25) merumuskan definisi organisasi sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan secara formal terikat dalam rangkaian pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut bawahan.

Menurut Sondang P.Siagian (dalam Wursanto,2005:53) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Atmosudrjo (dalam Zulkifli,2009;35) bahwa salah satu prinsip organisasi yaitu, organisasi itu harus mempunyai tujuan, yakni suatu tujuan yang hanya dapat dicapai melalui daya upaya (*efforts*) kerjasama yang teratur dan kontinu antara orang-orang yang bersangkutan. prinsip ini membawa konsekuensi, bahwa harus ada kesatuan pimpinan (*unity of command*) dan kesatuan arah gerak (*unity of direction*).

Menurut Nawawi membagikan organisasi kedalam dua pengertian yakni organisasi dalam arti statis dan organisasi kedalam arti dinamis (Nawawi,2008;9).

Adapun organisasi dalam arti statis yaitu :

“Sebagai wadah berhimpun sejumlah manusia oleh karena memiliki kepentingan yang sama. Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa sifat statis terletak pada dua kondisi yaitu : setiap organisasi memiliki struktur yang cenderung tidak berubah-ubah, serta posisi, status dan jabatan setiap individu cenderung permanen”.

Kemudian pengertian organisasi dalam arti dinamis yang juga dikemukakan oleh Nawawi yaitu :

“Organisasi adalah proses kerjasama sejumlah manusia (dua orang atau lebih) untu mencapai tujuan bersama. Dari pengertian tersebut dapat terlihat bahwa sifat dinamisnya sebuah organisasi terletak pada dua kondisi yaitu, kerjasama yang berlangsung secara berkelanjutan yang merupakan sebagai rangkaian

kegiatan atau proses yang selalu mungkin menjadi lebih efektif dan efisien, serta interaksi antara manusia formal dan informal dalam sebuah organisasi yang tidak pernah sama dari waktu ke waktu”. (Nawawi,2008;10)

Menurut Siagian (dalam Engkoswara,2012;141), organisasi adalah setiap bentuk-bentuk persekeuntuan antara dua orang atau lebih yang berkerjasama secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan, dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Allen (dalam Hasibuan 2001;119), mendefinisikan organisasi sebagai proses penentuan dan pengelompokan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Menurut Donnel (dalam Hasibuan,2001:120) organisasi adalah pembinaan hubungan wewenang dan dimaksudkan untuk mencapai koordinasi yang struktural, baik secara Vertikal, maupun secara Horizontal diantara posisi-posisi yang telah disertai.

Organisasi ini bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi sebagai pijakan dalam operasionalnya. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat tidak pada profit.

3. Konsep Manajemen

Menurut Stoner dan Freeman (dalam Sitorus, 2009;3) mengemukakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sarana lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan Menurut Stoner & Wankel (dalam Pasolong,2010:82).

Menurut Handoko (dalam Martoyo,2005;5) yang menyatakan bahwa ada 3 alasan utaa diperlukan manajemen yaitu:

1. Untuk mencapai tujuan, maksudnya manajemen disebutkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, maksudnya manajemen dibutuhkan untuk menjaga yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi.
3. Untuk mencapai efesiensi dan efektivitas, maksudnya adalah suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda, salah satu cara umum adalah efesiensi dan efektivitas.

Menurut winardi (dalam sitorus,2009:3) mengemukakan pandangan bahwa manajemen adalah merupakan sebuah proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (actuating) dan tindakan pengawasan (controlling), yang dilaksanakan untuk mendeterminasi dan mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lain.

Menurut Terry (dalam sitorus,2009:8-9) mengatakan fungsi pokok manajemen, yakni planning, organizing,actuating, controlling yang disingkat dengan POAC. Agar POAC berjalan tentu saja harus tersedia sarana yang memadai yang dikenal dengan istilah 6 M, yakni Man, Material, Machines, Methods, Money, Markets.

4. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang di harapkan. (Marnis, 2010; 344)

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (Handoko, 2012; 359)

Tiga tipe pengawasan menurut Handoko (2012; 361) yaitu:

- a. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahuluan sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
- b. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).
- c. Pengawasan umpan balik (*feedback control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang menejer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi.

Seperti di definisikan oleh terry (dalam Zulkifli 2009; 122). Bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Menurut Siagian (2008; 115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan langsung.
Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya .
2. Pengawasan tidak langsung.
Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan.

Menurut Massie (dalam Zulkifli 2005;207), pengawasan merupakan proses yang mengukur prestasi yang berjalan dan menentukan ke arah yang telah di tentukan sebelumnya, pengertian pengawasan ini ternyata berkembang dan berubah mengikuti perkembangan praktis manajemen dan masyarakat. Pengertian pengawasan berkembang mulai dari sifat mandor, kontroler, mencari kesalahan sampai pada upaya yang lebih halus dalam fungsi kepemimpinan. Saat ini fungsi pengawasan lebih di anggap merupakan bagian dari fungsi manajemen yang berupaya agar Visi, Misi, Tujuan dan rencana yang sudah di tetapkan dapat tercapai sebagaimana semestinya.

Dalam organisasi terdapat beberapa faktor yang menuntut perlunya di operasikan fungsi pengawasan yaitu:

- a. Perubahan dalam lingkungan organisasi.
- b. Kompleksitas organisasi.
- c. Kesalahan yang sering terjadi.
- d. Dampak delegasi wewenang.

Pengawasan di lakukan untuk mendapatkan kepastian pencapaian tujuan organisasi secara efektifitas dan efisiensi, deskripsi dari kegunaan pelaksanaan pengawasan yang lebih luas dipaparkan oleh william travers jerome III, Dalam Harahap, 1996; 313 (dalam zulkifli 2009; 122) sebagai berikut:

1. Kontrol digunakan untuk mendapatkan standard prestasi yang dimaksudkan untuk menaikan efisiensi dan menekan biaya.
2. Kontrol digunakan untuk mengamankan aset perusahaan- perusahaan dari kemungkinan kecurian, pemborosan dan penyalahgunaan.
3. Kontrol digunakan untuk membuat standar kualitas untuk menjamin kualitas yang diinginkan, langganan atau manajer produksi tetap terjaga.
4. Kontrol didesain untuk menetapkan batas wewenang yang diselesaikan oleh top manajemen.
5. Kontrol digunakan untuk mengukur prestasi kerja.
6. Kontrol digunakan untuk perencanaan dan penyusunan program kegiatan.
7. Kontrol digunakan untuk menyeimbangkan berbagai macam rencana dan program yang ditetapkan top manajemen.
8. Kontrol didesain untuk memotivasi karyawan dalam perusahaan sehingga mereka dapat menyumbang prestasi terbaiknya kepada perusahaan.

Menurut Silalahi (2002; 391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan.

Sedangkan menurut Terry (dalam Zulkifli 2005; 204) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki

tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (dalam zulkifli dan Yogi 2014; 137) yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan standar.
2. Menetapkan Pelaksanaan kegiatan pengawasan (data hasil pengamatan. Laporan dan data statistik)
3. Pengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan.
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Sementara itu menurut Siswanto (2013; 140) pengawaan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah di tetapkan maka dengan demikian, menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja.
2. Mengukur kinerja.
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
4. Mengambil tindakan perbaikan.

5. Konsep Hiburan Umum

a. Pengertian Hiburan Umum

Menurut Wikipedia Hiburan adalah segala sesuatu, baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku, yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati, yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan. Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau klab malam, sebagai tempat-tempat untuk melepas lelah, Umumnya berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti music, karaoke, opera. Ada pula yang menyediakan permainan seperti bilyar hingga sarana perjudian. Bagi kalangan tertentu, permainan judi (*gambling*) dianggap sebagai hiburan atau sarana membuang sial. Selain itu, di beberapa negara ada juga klab-klab malam yang diperuntukkan untuk pertemuan keluarga yang tentunya berbeda dengan klab klab malam pada umumnya. Hiburan sering memberikan kesenangan, kenikmatan, dan tawa. Pada waktu atau konteks tertentu, ada juga tujuan tambahan yang serius. Misalnya, berbagai bentuk perayaan, festival religius, atau satire.

Pengertian hiburan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 , dalam ketentuan umum pasal 1, bahwa hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Menurut Wikipedia Pengertian umum adalah istilah bahasa Indonesia yang mempunyai definisi yaitu kebiasaan yang sudah baku dan sudah menjadi milik khalayak, umum mengacu pada hal yang sudah terbiasa terjadi dalam masyarakat, atau adapun yang menyatakan bahwa umum adalah kerakyatan, yang artinya orang kebanyakan, kata umum juga berarti lumrah, umum juga berarti untuk orang kebanyakan atau bertujuan untuk masyarakat. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Umum>, hari jum'at tanggal 13 Juli 2018, jam 14.08 Wib).

Jadi pengertian hiburan umum adalah suatu petunjukkan yang di adakan secara sengaja yang bertujuan untuk menghibur bagi masyarakat atau khalayak umum.

b. Jenis-Jenis Hiburan Umum

Berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum menjabarkan ada beberapa jenis hiburan umum, yaitu sebagai berikut:

1. Bioskop
2. Karaoke
3. Pub
4. Rental Video
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing
6. Kebun Binatang
7. Video Game/Play Station
8. Café
9. Group Band
10. Billyard

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di kota Pekanbaru merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai bentuk pengendalian atas tempat hiburan bagi para pengusaha tempat hiburan di Kota Pekanbaru agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku.

Berikut merupakan beberapa isi dari Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum:

Bab II Jenis-Jenis Hiburan Pasal 2

1. Bioskop
2. Karaoke
3. Pub
4. Rental Video, CD, dan LD
5. Taman Rekreasi
6. Kebun Binatang
7. Video Game/Play Statio
8. Cafe
9. Group Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka)
10. Billyard

Pada penelitian ini penulis meneliti tentang tempat hiburan umum yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dimana Pada Bab III Pasal 4 tertera ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang berbunyi seperti dibawah ini:

Bab III

Izin Hiburan

Pasal 3

- 1) Jarak Lokasi/tempat usaha hiburan minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan Hotel, Plaza, Pusat-Pusat Perbelanjaan dan pertokoan swasta, taman rekreasi/taman pancing dan kebun binatang.
- 2) Tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan atau lingkungan
- 3) Tidak tempat transaksi-transaksi obat-obatan terlarang
- 4) Tidak menggunakan obat-obatan terlarang
- 5) Tidak menjual minuman keras
- 6) Tidak menyediakan wanita malam dan atau penghibur (WTS)
- 7) Tidak tempat prostitusi
- 8) Tidak tempat kegiatan perjudian
- 9) Melengkapi syarat-syarat lain yang ditentukan dalam suatu Surat Keputusan Walikota.

Bab IV

Waktu Operasional Hiburan

Pasal 5

1. Bioskop :
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
 - c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
 - d. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB
2. Karaoke: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
3. Pub: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
4. Rental video CD dan LD: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
6. Kebun Binatang: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
7. Video / Play Station: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
8. *Cafe*: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
9. Group band: Dibuka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
10. Billyard: Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini sangat di perlukan untuk menspesifikasikan penelitian, agar tujuan dan maksud dari penelitian ini dapat di bahas dengan mudah dan di pahami dengan mudah, baik oleh si peneliti ataupun oleh si pembacanya, Dan adapun kerangka piker untuk penelitian yang sedang penulis kerjakan dapat dilihat pada gambar II.1:

Gambar II.3 : Kerangka Pikir Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Studi Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan).



Sumber: Modifikasi Penulis, 2018

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang telah dikemukakan peneliti diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : **“Penulis Menduga Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Belum Berjalan Secara Maksimal Di Dalam Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum”**. Untuk membuktikannya maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Siswanto (2013;140) yang menyebutkan bahwa pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah di tetapkan, maka dengan demikian, Siswanto menyatakan bawah terdapat empat langkah dalam pengawasan , yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja.
2. Mengukur kinerja.
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar.
4. Mengambil tindakan perbaikan.

D. Konsep Operasional

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari kesalah pahaman, penulisan memberikan definisikan konsep dalam penelitian ini. Maka penulis perlu mengoperasikan konsep-konsep diatas sebagai berikut:

1. Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur

dengan mendaya gunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

2. Administrasi Publik adalah proses penyelenggaraan kehendak publik (*public will*) sebagaimana yang dinyatakan di dalam hukum, dengan kata lain pengoordinasian usaha bersama untuk mengimplementasikan kebijakan umum. Lebih tegas dapat dikemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan cara unit perumus kebijakan dari keseluruhan pemerintahan-pemilih, legislatif atau eksekutif.
3. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.
4. Organisasi Publik adalah organisasi yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan layanan civil. Organisasi publik adalah organisasi yang terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara dan mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, dan melayani keperluannya, sebaiknya berhak pula memungut pajak untuk pendanaan, serta menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan yang dilanggar.

5. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sarana lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
6. Manajemen Publik adalah sebuah kinerja kompleks yaitu pemerintahan dan seluruh pegawainya untuk melayani publik dengan sebaik-baiknya, sehingga publik merasa terpenuhi dengan kinerja dari organisasi publik itu sendiri.
7. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.
8. Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum di kota Pekanbaru merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru sebagai bentuk pengendalian atas tempat hiburan bagi para pengusaha tempat hiburan di Kota Pekanbaru agar tidak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku.
10. Hiburan Umum adalah adalah suatu petunjukkan yang di adakan secara sengaja yang bertujuan untuk menghibur bagi masyarakat atau khalayak umum.

11. Satpol PP adalah Dinas yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan penertiban di lapangan atau masyarakat yang tidak menaati peraturan termasuk masyarakat yang memiliki usaha hiburan umum seperti karaoke, café, dan bioskop.

12. Indikator Variabel Analisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Adalah Sebagai Berikut:

- a) Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja yaitu sebagai satuan pengukuran yang dapat di gunakan sebagai petakan untuk penilaian hasil-hasil dari pelaksanaan pengawasan.
- b) Mengukur kinerja adalah membandingkan kerja di lapangan dengan Standar Operasional Pelaksanaan tersebut. Kinerja dapat di katakana dengan baik jika usaha yang di lakukan oleh Satpol PP dalam mengawasi hiburan umum, maka hiburan umum Kota Pekanbaru akan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
- c) Membandingkan kinerja sesuai dengan standar. Yaitu membandingkan antara konsep dan implementasi tentang kegiatan pengawasan itu sendiri yang dilakukan oleh Satpol PP kota Pekanbaru dengan cara pemeriksaan rutin kelapangan.
- d) Mengambil tindakan perbaikan disini di maksudkan adalah dimana ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran pelaku usaha hiburan umum dalam menjalankan usahanya baik dari izinnya maupun jam operasional usaha hiburan umum tersebut.

E. Operasional Variabel

Tabel II.1: Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan)

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
<p>Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan. Terry (dalam Zulkifli 2009; 122)</p>	<p>Pelaksanaan Tugas Pengawasan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.</p>	<p>1. Menetapkan Standard dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja.</p>	<p>a. Menyusun Jadwal Pelaksanaan Pemberian Sosialisasi Terkait Peraturan Daerah.</p> <p>b. Meyusun Jadwal Pengawasan Terkait Tempat Hiburan Umum.</p> <p>c. Pembentukan Tim Kerja.</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		<p>2. Mengukur Kinerja</p>	<p>a. Pelaksanaan Pemberian Sosialisasi Terkait Peraturan Daerah.</p> <p>b. Melaksanakan Pengawasan Terkait Tempat Hiburan Umum.</p> <p>c. Melakukan Penertiban Tempat Hiburan Umum.</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>
		<p>3. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar.</p>	<p>a. Memberikan respon terkait laporan masyarakat.</p> <p>b. Melakukan Koreksi Terkait Kinerja TIM kerja.</p> <p>c. Melakukan Evaluasi terhadap tempat hiburan umum, sesudah dan sebelum diberikan sosialisasi.</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Kurang Terlaksana</p>

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
1	2	3	4	5
		4. Mengambil Tindakan Perbaikan.	a. Memberikan Pembinaan/ Penyuluhan b. Mengutamakan Kepentingan Umum /Masyarakat c. Pelaksanaan Pemberian sanksi	Terlaksana Cukup Terlaksana Kurang Terlaksana

Sumber: *Olahan Penulis Tahun 2018*

F. Teknik Pengukuran

Teknik Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menetapkan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator.

Untuk menentukan pengukuran masing masing indikator dari variabel penelitian mengenai Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan), teknik pengukuran yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penelitian Yang Berjudul Analisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan) berada di antara persentase 67% - 100%.

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Penelitian Yang Berjudul Analisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

(Studi Kasus: Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan) berada di antara persentase 34% - 66%.

Kurang Terlaksana : Penelitian Yang Berjudul Analisis Pelaksanaan Tugas Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Tempat Hiburan Umum Di Kecamatan Tampan) berada di antara persentase 1% - 33%.

1. Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Menetapkan Standar Dan Metode Untuk Pengukuran Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%.

2. Mengukur Kinerja

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengukur Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengukur Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengukur Kinerja telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%.

3. Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari

responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Membandingkan Kinerja Sesuai Dengan Standar telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%.

4. Mengambil Tindakan Perbaikan.

Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 34-66%.

Kurang Terlaksana : Apabila hasil penelitian terhadap indikator Mengambil Tindakan Perbaikan telah di laksanakan sesuai ketentuan atau jawaban dari responden yang berada pada rata-rata persentase di angka 0-33%.